



# Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



## Mengejar Ketertinggalan Pendidikan

# Tantangan Pendidikan



foto: www.hipwee.com

**A**pa kabar pembaca majalah Cirebon Katon? Doa awal kami sampaikan untuk edisi Februari ini, semoga pembaca budiman tetap dalam keadaan baik dan selalu sehat.

Seperti kita ketahui, pandemi Covid-19 hingga saat ini tampaknya belum usai. Bahkan telah bermutasi menjadi beberapa varian baru. Dari varian Beta, Delta, Gamma hingga terbaru bernama Omicron. Akibatnya, hal itu semakin menjadi tantangan bagi dunia pendidikan.

Pagebluk setidaknya telah memberikan gambaran atas kelangsungan perubahan dunia pendidikan yang mengedepankan bantuan teknologi dalam menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Transformasi digital pun meniscayakan pemerataan di seluruh wilayah. Meski demikian ada hambatan baru jika tingkat anak mengikuti pendidikan menurun.

Sebelum itu, kondisi pendi-

dikan di Kabupaten Cirebon telah lebih dahulu mendapatkan tantangan. Terutama dalam indeks dan angka lama sekolah yang masih rendah.

Pada edisi kali ini, Cirebon Katon pun menyajikan kepada pembaca setia mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Cirebon secara aktual. Kami merunutnya dari permasalahan yang mendasar hingga solusi yang tengah dijalankan Pemkab Cirebon dalam meningkatkan indeks pendidikan.

Banyaknya pihak yang menginginkan kami menyajikan isu pendidikan tersebut tentu menjadi sebuah kehormatan. Bahwa demikian besar kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam menjadi salah satu sumber informasi terkini di Kabupaten Cirebon.

Semoga kami dapat membalasnya dengan karya liputan yang bermanfaat dan terbaik bagi seluruh pembaca budiman. Selamat membaca Cirebon Katon.

## Pembina/Penasehat :

**H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si**  
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Rudiana, SE**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Teguh Rusiana Merdeka, SH**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Drs. H. Subhan**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

## Pengarah :

**Muklisin Nalahudin, SH, MH.**  
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

**Munawir, SH.**  
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

**Abdul Rohman**  
(Ketua Komisi 1)

**Mad Saleh**  
(Ketua Komisi 2)

**H. Hermanto, SH**  
(Ketua Komisi 3)

**Siska Karina, MH**  
(Ketua Komisi 4)

## Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

**Ikin Asikin, S.Sos, M.Si**  
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

## Wakil Pimpinan Redaksi :

**Drs. Raden Chaidir Susilaningrat**  
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

**Drs. H. Sucipto, MM**  
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

## Redaktur Pelaksana :

**Handi Eko Prasetyo, S.Kom, MM**  
(Kasubag Humas dan Protokol)

## Redaksi Ahli :

**S. Yudi**

## Penyunting :

**Dra. Puti Amanah Sari**  
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

## Redaktur :

**Yusuf**

## Reporter :

**Maulana • Mu'izz • Hasan • Sarah**

## Fotografer :

**Qushoy**

## Desain Grafis :

**Boyke Datu • Andri**

## Data dan Riset :

**Oman**

## Distribusi :

**Firman • Misbah**

## Korespondensi:

**redaksi.cika@gmail.com**

## Penerbit :

**Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**  
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon  
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



## 04 | FOKUS

Angka Pendidikan Rendah, Peringkat Terbawah

10 | Mengejar Ketertinggalan dengan Sosialisasi dan Penerapan Sanksi



## 14 | KILAS

Ikuti Sosialisasi MKD DPR RI



## 18 | PUBLIKA

Minta Sediakan Cermin Lalu Lintas



## 20 | INSPIRASI

Miniatur dari Korek Api  
Semula Iseng Jadi Buruan Warganet



## 22 | LENSA

Perayaan Imlek 2022  
Tetap Khusyuk Meski Sederhana



## 24 | PROFIL

Mahmudi Terenyuh Saat Anak-Anak Minta Ajari Mengaji

## 28 | DINAMIKA

Komisi I: Perangkat Desa Harus Pahami  
Aturan dan Tupoksi

30 | Sidak Pengelolaan Wisata Banyu Panas Gempol

32 | Komisi III Studi Banding Pengelolaan Aset PSU  
Subsidi

34 | Tiga Raperda Usulan Eksekutif dan Legislatif  
Dihantarkan

## 36 | POTENSI

Embung Sarwadadi akan Dikembangkan  
Jadi Wisata Desa



## 38 | DESA

Dompyong Wetan  
2022, Fokus Pembenahan Jalan

# Angka Pendidikan Rendah, Peringkat Terbawah

BPS mencatat, indeks pendidikan Kabupaten Cirebon berada di urutan 25 tingkat provinsi. Sementara angka rata-rata lama menempuh sekolah masih setara 2 SMP.



Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon mencatat, rata-rata lama sekolah (RLS) warga Kabupaten Cirebon tahun 2021 memiliki angka 7,10. Yang artinya rerata jenjang pendidikan masyarakat Kabupaten Cirebon setara kelas 2 SMP. Sebelumnya pada 2019 lalu memiliki angka 6.71. Dan naik sedikit pada 2020 dengan angka 6.90.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi mengungkapkan, pada tahun 2018 RLS di Kabupaten Cirebon bahkan sempat berada di angka 56,01, kemudian di tahun 2019 naik menjadi 56,37. Menurutnya, kenaikan yang hanya 0,36 poin dalam tempo tahun 2019 merupakan ironi. Pasalnya pos-

tur anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon selalu menjadi salah satu yang terbesar.

“Meski jumlah besarnya tidak tahu persis, tetapi porsi belanja pegawainya juga lumayan besar, karena Disdik tertinggi. Tapi apakah anggaran total itu sudah signifikan untuk tingkatkan indeks pendidikan,” ungkap politisi Fraksi PKS itu.

Disdik mencatat, pada 2019 jumlah siswa yang bersekolah di jenjang SD yakni sejumlah 201.429 siswa. Sementara pada 2020 angkanya sedikit berkurang menjadi 198.131 siswa dan turun kembali pada 2021 menjadi 197.340 siswa.

Sementara untuk tingkat SMP, dalam kurun 3



tahun terakhir justru mengalami peningkatan. Yakni pada 2019 sejumlah 78.638 siswa, tahun 2020 sebanyak 79.650 hingga naik kembali menjadi 81.528 siswa pada 2021.

Berdasarkan data Disdik, dalam kurun 3 tahun terakhir terdapat 590 anak yang harus *drop out* (DO) atau putus sekolah pada jenjang SD hingga SMP terhitung sejak 2019 sampai 2021. Rinciannya, tahun 2019 angka putus sekolah di jenjang SD sebanyak 62 siswa. Tahun 2020 ada 47 siswa dan pada 2021 sejumlah 16 siswa.

“Sementara angka putus se-

kolah jenjang SMP pada 2019 sebanyak 215, tahun berikutnya berkurang menjadi 166 dan terakhir pada 2021 sebanyak 84 siswa terpaksa *drop out*,” ujar Kasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Disdik Kabupaten Cirebon Muhamad Rukhyat Zain.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon juga mencatat, harapan lama sekolah (HLS) di Kabupaten Cirebon dalam tiga tahun terakhir pada 2019 yakni 12.24 poin. Beranjak naik pada 2020 dengan angka 12.25 poin dan 12.27 pada 2021.

Sementara untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2021 jenjang SD yakni 103.99 poin, SMP 97.78 dan SMA 80.78 poin. Selanjutnya Angka Partisipasi Murni (APM) yakni SD 95.80, SMP 81.44 dan SMA 60.31 poin.

Padahal jika dilihat dari jumlah bangunan sekolah keseluruhan, tiap tahun di Kabupaten Cirebon selalu mengalami peningkatan. Dengan rincian jumlah bangunan SD mencapai 919 bangunan pada 2019 silam. Sementara pada 2020 menjadi 929 serta pada 2021 mencapai 930 bangunan SD.

Sedangkan untuk sekolah SMP, saat ini Kabupaten Cirebon memiliki total 205 sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Jumlah bangunan SMP sebenarnya sangat tidak sesuai dengan jumlah SD yang mencapai 900,” ujar Rukhyat.

Junaedi menjelaskan, untuk menghitung indeks pendidikan saat ini mengalami perubahan sejak 2014. Indeks pendidikan tidak dikenal lagi angka melek huruf, hanya rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah yang menjadi tolok ukur.

Oleh karena itu Junaedi pun mengingatkan, dengan posisi indeks pendidikan berada di urutan ke-25 di Jawa Barat pada 2021, semua komponen harus terpacu dan berbenah, bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Cirebon jauh dari harapan.

“Bahkan Bupati Cirebon sendiri sudah menyinggungnya dalam sebuah acara, bahwa rata-rata usia sekolah kita baru di angka 7, sekian. Artinya kira-kira kelas dua SMP saja belum tamat. Angka itu, diperoleh dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang dihitung berapa rata-rata lama sekolah mereka. Dan ternyata hasilnya cuma 7 tahun,” katanya.

# Menilik Tingginya Angka Putus Sekolah

Keterbatasan ekonomi hingga minimnya rombel sekolah menjadi penyebab, mengapa angka anak putus sekolah di Kabupaten Cirebon masih tinggi.



**B**aru juga subuh berkumandang, Karyadi sudah terjaga. Memanaskan Astuti. Motor bututnya yang biasa ia gunakan pergi meladang. Ketika teman sebayanya bersiap mandi dan memakai seragam sekolah, Karyadi justru menyiapkan cangkul dan sprayer. Seperti biasa, selepas salat subuh, Karyadi akan berangkat ke sawah milik bosnya.

“Saya kerja di sawah orang. Jadi jam 6 saya harus sudah di tempat. Dulu saya cuma sekolah SD, itu juga hanya sampai kelas 5. Saya berhenti karena merasa enggak nyaman ibu sama bapak saya hanya buruh tani tapi mereka harus membiayai sekolah

saya dan kakak saya yang waktu itu sudah SMP,” ujar Karyadi.

Semenjak tidak sekolah, Karyadi pun diminta membantu ibu dan bapaknya bekerja di sawah. Di usia 16 tahun kala itu, Karyadi bahkan sempat merantau bekerja bersama saudaranya ke Sulawesi.

“Umur 14 tahun saya sudah ikut ke sawah sama bapak. Dulu bayarannya Rp 35 ribu sekarang sudah Rp 60 ribu. Terus saya juga pernah ke Sulawesi, di sana saya kerja proyek pembangunan,” ujarinya.

Karyadi pun harus memaksakan tubuhnya untuk bekerja layaknya orang dewasa. Karyadi memang



tak punya pilihan.

“Umur saya sekarang 19 tahun, saya juga pengen bisa lanjut sekolah, tapi malu kalau harus ngulang dari SD. Belum lagi biaya pendaftaran atau buat kebutuhan lainnya, saya bingung buat bagi-bagi keperluannya. Apalagi sayas juga harus bisa ngasih ke orangtua,” ucap Karyadi.

Saat ini Karyadi pun memilih bekerja di sekitar tempat tinggalnya. Dari menggarap sawah hingga kuli proyek bangunan. Ia tak ingin merantau jauh kembali. “Saya cuman pengen dekat dengan kedua orangtua saja kalau sekarang,” tuturnya.

Tak jauh berbeda dengan Sardai (20), pemuda Desa Sindangmekar. Ia hanya menamatkan sekolah dasar. Tahun 2012 setelah ia lulus, Sardai diminta bekerja oleh ibunya. Ibunya tak bisa lagi bekerja setelah sakit kaki yang didera. Ia pun terpaksa harus membantu menafkahi keluarga.



Muhammad Rukhyat Zain (Kasi Tendik SMP - Dinas Pendidikan)

“Bapak sudah enggak ada juga. Makanya saya diminta bantu ibu. Saya kerja di pasar Tegalubug ikut paman saya. Sekarang saya kerja di pemolaan pembuatan kusen,” ujar Sardai.

Sardai berkeinginan melanjutkan pendidikannya. Untungnya saat ini ia mendapat kemudahan dengan dibantu lembaga

masyarakat melanjutkan ke jenjang kejar paket.

Sementara Sandi, pemuda asal Desa Rawaup mungkin lebih beruntung. Ia sempat melanjutkan ke SMP Ma’arif Pangenan meski harus berhenti setelah dua semester berjalan.

“Dulu saya bingung, karena saat itu orang tua sakit-saki-



tan dan saya juga merasa tidak nyaman di sekolah. Jadi sampai semester 2 saya sudah jarang berangkat, terkadang saya bantu orang tua saya bekerja di sawah,” kata Sandi.

Selepas putus sekolah, Sandi juga sempat merantau ke Bekasi dan Bogor. Bermodal dengan ijazah SD, Sandi tidak berharap lebih untuk dapat kerja. Ia sempat jualan minuman keliling untuk menghidupi.

“Saya pernah merantau di Bekasi dan Bogor selama 5 tahun. Di sana saya kerja apa aja, kadang jualan minuman bersama saudara. Sekarang saya kerja serabutan, terkadang buruh tani, buruh lepas di pabrik, dan ikut jadi panjak burok di daerah saya,” paparnya.

Sandi sempat berkeinginan mengikuti sekolah penyetaraan SMP, tapi ia tak punya biaya. Ia hanya tahu, tak ada sekolah yang gratis meski itu kejar paket. Penghasilannya yang belum mementu saat itu, menjadi penyebab ia mengurungkan niatnya.

“Pernah sih ditawari sama teman buat kejar paket B, tapi belum apa-apa sudah pusing mikirin biayanya dari mana. Saya enggak enak kalau harus minta ke orang tua, mereka juga lagi susah belum lagi ibu yang sedang sakit,” katanya menghela nafas.

Meski demikian, Kasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon Muhammad Rukhyat mengaku, Disdik terus berupaya mengurangi jumlah

anak putus sekolah di Kabupaten Cirebon.

“Sampai saat ini jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Cirebon semakin berkurang. Di tingkat SMP yang pada 2019 berjumlah 215, di tahun 2021 sudah turun menjadi 84. Sementara yang tingkat SD pada tahun 2019 berjumlah 62, di tahun 2021 menjadi 16 anak,” ungkap Rukhyat.

Rukhyat pun menilai, faktor penyebab masih ada anak putus sekolah karena suasana sekolah tak nyaman maupun sistem Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang membosankan. Selain itu, masih kurangnya kepedulian dari keluarga dalam mengatur pendidikan anak.

“Terkadang ada orang tua ingin anaknya sekolah di SMP terbaik,





tapi kemampuan anaknya tidak mampu jadi malah enggak nyaman. Sering juga terjadi orangtua yang kurang mendorong anak sekolah karena orangtua sibuk kerja dan sebagainya,” jelas Rukhyat.

Oleh karena itu ia berharap, orangtua juga harus bisa mengedukasi anaknya agar bersemangat untuk sekolah dan bukan hanya mau. Menurutnya, setiap anak berhak mendapat pendidikan selama 12 tahun.

Ketua PGRI Kabupaten Cirebon Yeyet Nurhayati juga berpendapat, faktor utama angka putus sekolah yang umumnya karena keluarga. Baik karena *broken home*, ada juga orangtua yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Akibatnya anak tidak terkontrol. Faktor lainnya karena kualitas SDM orangtua siswa yang rendah.

“Jadi banyak yang mencukupkan anaknya hanya tamat sekolah SD atau orangtua hanya mencukupkan anaknya hanya bisa baca dan tulis saja. Jadi boro-boro untuk lanjutkan SMP,” ujar Yeyet

Selain itu, ekonomi juga menjadi penyebab. Terutama di pelosok kampung. Orangtua yang berpikiran kolot beranggapan sekolah itu hanya membuang biaya. Mau tidak-mau, kata Yayat, mereka hanya ingin menyekolahkan anak di sekolah negeri karena murah. Sementara ketika anak tak diterima di negeri, mereka enggan menyekolhkannya ke swasta karena biayanya yang mahal.

“Sehingga anak pun dicukupkan untuk sekolah. Orangtua juga enggak ngerasa bersalah. Karena di sisi lain beban ekonomi keluarga jadi berkurang,” tuturnya.

Sementara saat ini, akibat pandemi banyak juga anak yang



Nana Kencanawati (Anggota Komisi IV)

berhenti sekolah karena pembelajaran yang mengharuskan daring. Namun persoalannya tidak semua orangtua mampu memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring baik gawai maupun jaringan internet. Sehingga sebagian orangtua pasrah dan memutuskan anak berhenti sekolah.

Di luar dari persoalan internal, lanjut Yeyet, faktor lain seorang siswa berhenti melanjutkan pendidikan juga karena tak diterima di sekolah tertentu yang menjadi dambaan. Maka tidak aneh, kalau sebagian sekolah yang justru mendapatkan murid sedikit, sementara lainnya kekurangan kelas rombongan belajar (rombel).

“Itu karena tidak ada ketegasan untuk mengatur kuota siswa tiap sekolah. Jadi yang sudah penuh justru nambah rombel. Sekolah lain rombelnya ada, siswanya yang kurang,” kata Yeyet.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Nana Kencanawati juga menilai peran orangtua yang memiliki pengaruh penting dalam melaku-

kan langkah preventif anak putus sekolah.

“Pergaulan anak-anak desa sekarang ini saja sudah berubah karena teknologi semakin cepat. Cara berpikir anak instan. Mereka mudah terbawa arus percepatan teknologi tanpa mencerna dan mencari jati diri. Karena kecanduan bermain gawai sehingga malas untuk bersekolah itu juga jadi penyebab,” kata Nana.

Sehingga menurutnya, peran kolaborasi dalam memberikan edukasi orangtua menjadi penting. Agar mendorong anaknya tetap sekolah. Sementara bagi mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi, kata Nana, bisa diselesaikan melalui bantuan sosial yang bisa dimanfaatkan untuk bidang pendidikan.

“Bantuan dari pemerintah desa jangan hanya dialokasikan untuk bantuan sosial. Tetapi juga untuk bantuan pendidikan. Memang sekarang susah karena bantuan sosial harus diutamakan untuk pandemi. Tetapi kalau pandemi selesai alokasi bantuan juga harus disisihkan untuk pendidikan anak yang tak mampu di desa,” pungkasnya. •Par

# Mengejar Ketertinggalan dengan Sosialisasi dan Penerapan Sanksi

Disdik tengah gencarkan sosialisasi untuk cegah angka anak putus sekolah meningkat. Sementara Ketua PGRI berpendapat, perlu penerapan sanksi tegas untuk atur kuota siswa tiap sekolah.



**R**endahnya ranking indeks pendidikan Kabupaten Cirebon dalam skala provinsi yang berada di urutan ke 25, menjadi alasan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon harus berscepat mengejar ketertinggalan.

“Disdik harus kejar ketertinggalan indeks pendidikan melalui program yang mampu mendorong angka rata-rata lama sekolah meningkat. Kita sedih urutan pendidikan kita masih rendah di provinsi,” ujar Yeyet Nurhayati, Ketua PGRI Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, upaya mencegah angka putus se-

kolah dapat dilakukan melalui bimtek peningkatan kualitas SDM bagi guru dan orangtua. Pertama, guru dapat mengedukasi siswa untuk langkah preventif. Bagi siswa yang terlanjur *drop out* (DO), guru harus mendatangi rumah anak tersebut terlebih dahulu untuk membujuknya melanjutkan sekolah.

“Kadang guru kalau tahu siswa DO justru membiarkan saja. Itu juga persolan makanya kami di PGRI juga mendorong guru-guru untuk mendidik siswa-siswinya sepenuh hati,” kata Yeyet.

Selanjutnya tak kalah penting, yakni upaya menge-



Novi Komalasari (Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Disdik Kabupaten Cirebon)

dukasi orangtua yang sangat mempengaruhi anak memilih lanjut atau berhenti sekolah. Bagi siswa-siswi yang berhenti karena alasan ekonomi, perlu sosialisasi jika pemerintah telah memiliki program wajib belajar 12 tahun yang dapat diakses secara gratis. Begitu pun dengan program bantuannya.

Selain itu, bagi siswa yang berhenti karena tidak diterima di sekolah tertentu, Disdik harus menyadarkan orangtua siswa agar tetap menyekolahkan anaknya di sekolah manapun.

“Karena setiap sekolah menggunakan kurikulum yang sama saat memberikan pelajaran. Yang paling penting anak mau sekolah dulu di sekolah manapun,” jelasnya.

Disdik juga harus berani mengatur kuota siswa setiap sekolah, dengan menginstruksikan sekolah-sekolah tidak melebihi ketersediaan rombongan belajar (rombel). Bagi sekolah yang melanggar aturan, bisa diberikan sanksi tegas bertahap.

“Hal itu juga agar pembelajaran di sekolah menjadi efektif. Jangan sampai ada satu sekolah kebanyakan siswa, yang lainnya justru kekurangan siswa,” tutur Yeyet.

Sementara bagi siswa yang

telah berumur dewasa dan terlanjur DO dalam jangka waktu yang lama, Yeyet sepakat dntaskan melalui program penyetaraan pendidikan dengan tambahan muatan pelatihan *skill* dan wirausaha.

Kasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Disdik Kabupaten Cirebon Muhammad Rukhyat menerangkan, Disdik tengah berupaya mengejar ketertinggalan pendidikan dengan memudahkan anak tetap sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menutupi biaya operasional sekolah hingga program Kartu Indonesia Pintar (KIP), kata Rukhyat, menjadi solusi bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Jadi keterbatasan ekonomi seharusnya bukan faktor anak tidak lagi mau sekolah maupun putus sekolah,” kata Rukhyat.

Rukhyat mengungkapkan, Disdik telah gencar menyosialisasikan pentingnya mengakses pendidikan untuk menaikkan indeks pendidikan bagi warga yang belum mendapatkan pendidikan dasar.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Disdik Kabupaten Cirebon Novi Koma-

lasari mengatakan, bagi mereka yang tak bisa melanjutkan sekolah karena sudah berumur, Disdik tengah berupaya mendorong regulasi penyetaraan anak putus sekolah melalui lembaga PKBM.

Pemkab Cirebon telah memiliki UPTD pendidikan khusus non formal, bernama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang terletak di Kelurahan Gegunung, Kecamatan Sumber yang telah berperan aktif membantu penyetaraan pendidikan masyarakat yang putus sekolah.

Novi mengatakan, dari kurikulum, metode hingga ujian, PKBM memiliki kesamaan dengan pendidikan formal. Perbedaannya hanya pada penyelenggaraan saja. Dari seluruh PKBM yang ada, total jumlah peserta didik saat ini mencapai 11.979 siswa. Jumlah tersebut mencakup kategori usia 7-21 tahun hingga usia dewasa.

Untuk kategori usia 7-21 tahun, Pemkab tak membebankan biaya karena telah dibantu melalui Bantuan Operasional Pemerintah (BOP). Hanya bagi usia 21 tahun ke atas, calon peserta didik harus mengeluarkan biaya. Sejauh ini, terdapat 75 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah berjalan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.

“Kita harus jemput bola. Warga yang putus sekolah harus diberikan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ayo hak mereka kita sambut dari negara untuk mereka,” jelas Novi.

Disdik senantiasa menginstruksikan pemerintah desa untuk mendaftarkan minimal satu warga yang putus sekolah ke PKBM. Bahkan hingga mengintervensi Muspika kecamatan agar bisa menganggarkan dana untuk pendidikan kesetaraan.



Yeyet Nurhayati Ketua PGRI Kabupaten Cirebon

“Untuk kejar paket sebenarnya sudah dibahas, kami minta pemdes mendata 10 orang yang ingin kejar paket dan diajukan di setiap Musrenbang. Agar pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran. Tahun depan 10 warga yang belum mengenyam pendidikan dasar wajib mendaftar ke PKBM. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita urai kendala dan caranya solusinya,” ungkap Novi.

Sementara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, Disdik Kabupaten Cirebon juga akan menggelontorkan bantuan pendidikan operasional PKBM. Anggaran sebesar Rp 3,9 miliar yang bersumber dari APBD telah disiapkan. Jumlah tersebut dibagi untuk honor pengajar (tutor) dan perbaikan infrastruktur PKBM.

“Kita baru bisa memberikan honor untuk 5 tutor di setiap PKBM. Kalau idealnya paket A 10 tutor dan paket B 12 tutor,” katanya.



Novi pun mengakui keberadaan tutor kesetaraan sampai sekarang kurang diperhatikan pemerintah. Apalagi hingga kini tutor kesetaraan belum bisa mengajukan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas tutor, Novi telah merancang akan menyediakan forum tutor kesetaraan. Dalam forum tersebut,

para tutor nantinya saling berbagi pengalaman mengajar dan merumuskan bersama kemajuan program PKBM.

“Kegiatan ini akan kita rintis untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran kesetaraan. Kita juga akan anggarkan di tahun depan nanti. Di luar itu, kita juga tetap lakukan sosialisasi ke masyarakat agar tidak ada anak yang putus sekolah,” pungkasnya.

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

# Ikuti Sosialisasi MKD DPR RI

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon bersama ketua Badan Kehormatan (BK) dan ketua Komisi menghadiri acara sosialisasi tugas dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang digelar di Mapolresta Cirebon.

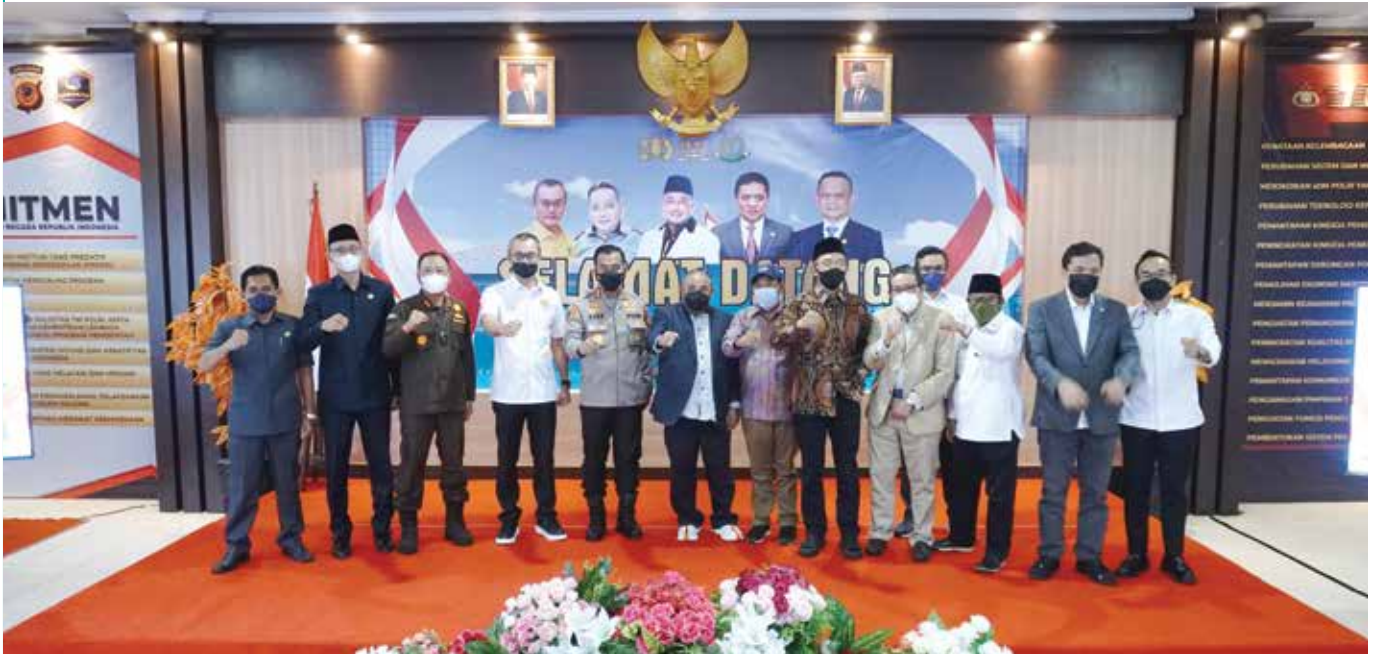


Foto: foto: qusoy/ck





# Hadiri Pelantikan Igornas Kabupaten Cirebon

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menghadiri acara pelantikan Ikatan Guru Olahraga Nasional (Igornas) Cabang Cirebon di Pendopo Bupati Cirebon.



Foto: foto: quoy/dk



# Tanggapi Raperda Retribusi Tenaga Kerja Asing

Tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Cirebon menyampaikan pandangan terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) usulan Bupati Cirebon mengenai retribusi untuk tenaga kerja asing.



Foto: foto: qusoy/ck





# Terima Kunker DPRD Klaten

Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Drs Chaidir Susilaningrat menerima kunjungan Pimpinan Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Klaten.



Foto: foto: qusoy/dk



# Minta Sediakan Cermin Lalu Lintas



Salam hormat Bapak/Ibu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Perkenalkan saya Mulyadi (24) dari Desa Kalitengah. Saya ingin meminta penyediaan salah satu fasilitas penunjang keamanan berkendara seperti safety mirror, atau cermin lalu lintas di Jalan Pahlawan Desa Kalitengah, Tengahtani tepatnya di Blok Bandil.

Permintaan ini bertujuan agar pengendara dapat lebih mudah saat melihat kendaraan lain dari arah yang tak terlihat atau blind spot. Di desa kami setidaknya terdapat tiga tikungan yang rawan. Dua diantaranya memiliki tikungan yang begitu tajam ditambah kondisi jalan aspal yang rata.

Tentu hal ini seringkali membahayakan bagi pengendara yang melintas. Untuk itu, menurut saya perlu disediakan cermin lalu lintas agar pengendara dapat lebih waspada, serta bisa melihat objek yang tak terlihat. Mohon kiranya bapak/ibu dewan dapat menerima aspirasi kami. Terimakasih.

(Mulyadi/Kalitengah/Cirebon)



## Penerapan Prokes Kian Menurun

Assalamu'alaikum wr wb

Kepada Bapak/Ibu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang terhormat. Saya Dini (Bukan nama sebenarnya), warga Desa Gempol. Saya mewakili diri saya pribadi ingin berpesanan kepada seluruh anggota dewan maupun Pemerintah Kabupaten Cirebon, agar waspada terkait lonjakan Covid-19 di Cirebon yang kian mencemaskan.

Hari ini saya melihat penerapan protokol kesehatan (Prokes) di pusat keramaian mulai berkurang, padahal angka yang terpapar Covid-19 masih meningkat. Tentu hal ini tak boleh ditinggalkan begitu saja. Pasalnya penerapan prokes begitu penting guna menekan laju penyebaran pandemi.

Jangan sampai ekonomi warga yang sedang berangsur pulih, kembali lesu akibat ketidaktegasan atau lambannya penanganan kepada pelanggar prokes. Saya juga berharap DPRD Kabupaten Cirebon dapat dengan serius menyikapi hal ini, sekaligus mendorong masyarakat Cirebon secara luas agar tidak mengabaikan prokes di manapun mereka berada. Karena pandemi belum usai.

(Dini/Mahasiswi/Cirebon)

## Tindak Aksi Nekat Hadang Truk

*Salam Hormat Bapak/Ibu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Semoga senantiasa diberikan kemudahan.*

*Mohon izin menyampaikan informasi, sebelumnya perkenalkan saya Heri (Bukan nama sebenarnya) dari Desa Bunder, Kecamatan Susukan. Saya ingin melaporkan mengenai aksi para remaja yang kerap menghadang truk seperti yang sering terlihat di beberapa titik jalan pantura Cirebon. Mirisnya lagi, aksi menghadang truk ini kerap dilakukan oleh kaum pelajar yang terkadang masih dibawah umur.*

*Pasalnya selain meresahkan, aksi menghadang truk membuat kelancaran lalu lintas menjadi terganggu dan tentu sangat berbahaya.*

*Meski sudah ada pasal yang melarang, namun rupanya tak cukup membuat para pelaku penghadangan truk gentar dalam menjalankan aksinya meskipun nyawa menjadi taruhan. Saya berharap kedepan ada sanksi yang benar-benar tegas untuk melarang tindakan yang membahayakan ini. Terimakasih Cirebon Katon berkenan menerbitkan.*

**(Heri/Wiraswasta/Cirebon)**



## Awasi Pohon Rawan Tumbang



*Assalamu'alaikum Wr Wb*

*Belakangan ini sering sekali terjadi insiden pohon tumbang di berbagai daerah di Kabupaten Cirebon. Seperti yang pernah terjadi di jalan pantura Mundu. Akibatnya pohon tumbang tersebut sempat membuat macet panjang. Bahkan ada juga yang sampai mengganggu akses penghubung antar daerah, seperti kejadian pohon tumbang di flyover tol Kedawung-Talun beberapa waktu yang lalu.*

*Oleh karenanya, saya Hanif (22) dari Kecamatan Kedawung meminta kepada yang terhormat Bapak/Ibu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon agar dapat mendorong dinas yang bersangkutan untuk mengantisipasi hal demikian.*

*Saya berharap ada antisipasi melalui penyisiran pohon yang rawan tumbang dan berpotensi rubuh baik akibat cuaca buruk maupun karena usia, agar bisa mencegah risiko kerugian yang terjadi.*

*Meskipun keberadaan pohon-pohon ini membawa manfaat, akan tetapi saya melihat masih terlalu berisiko jika keberadaannya dibiarkan tanpa pemeliharaan yang intens dan pengawasan. Terlebih di musim penghujan seperti sekarang. Kita khawatir hal serupa akan terjadi.*

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

**(Hanif/Mahasiswa/Cirebon)**

# Miniaturnya dari Korek Api Semula Iseng Jadi Buruan Warganet

Berbekal hobi fotografi, Ikhwan membuat bekas korek api itu menjadi miniatur indah yang bercerita. Hasil karyanya ternyata disukai warganet. Seperti apa?



**S**ekali pakai, batang korek api biasanya hanya akan dibuang dan menjadi sampah. Namun hal itu tidak berlaku bagi Muhammad Ikhwan, seorang pemuda dari Desa Palimanan, Kecamatan Palimanan. Ikhwan mengolahnya menjadi barang yang bernilai. Melalui tangan kreatifnya, batang korek api bekas tersebut diubah menjadi berbagai miniatur yang indah yang berkarakter.

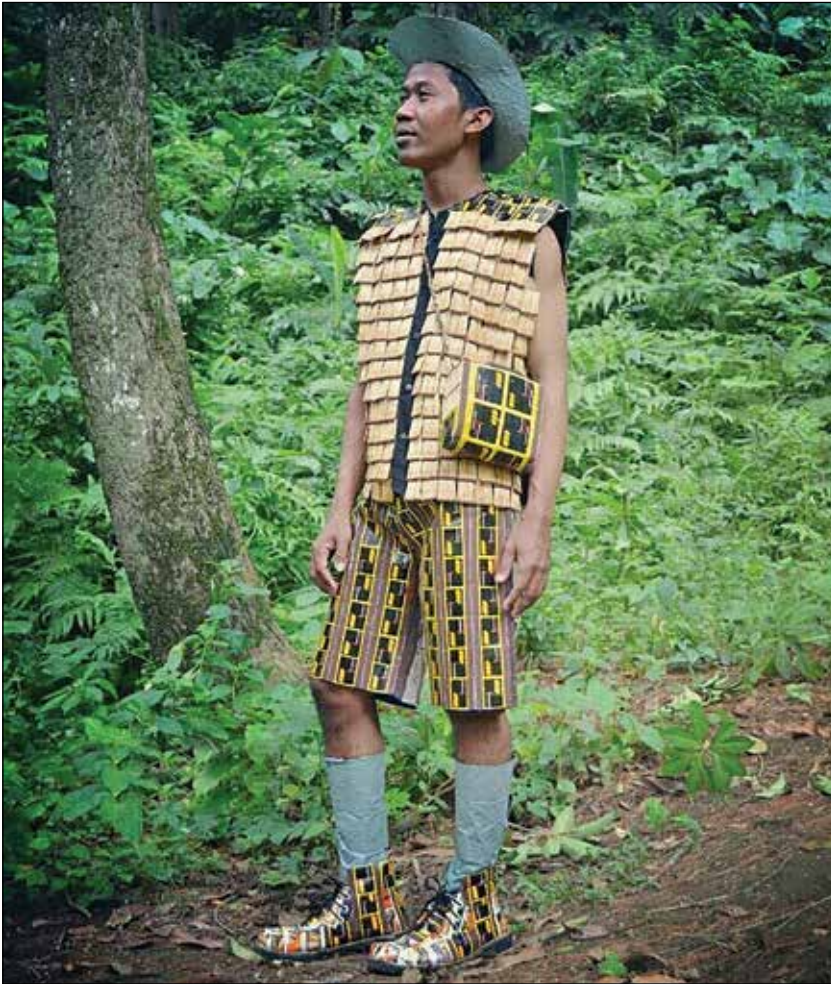
Tak hanya itu, Ikhwan juga melengkapinya dengan narasi cerita yang bertutur. Misalnya jelang penyelenggaraan Asian Games, ia membuat patung miniatur batang korek api yang bermakna ajakan mendukung Indonesia juara.

Ada juga, bentuk geretan yang bertema edukasi

kebersihan lingkungan dengan ajakan membuang sampah pada tempatnya, seorang murid yang sedang belajar mengaji kepada gurunya hingga bentuk yang menggambarkan kerinduan bermain bola saat musim penghujan.

Hasil karyanya pun ia unggah di akun Instagram miliknya bernama @Bangkorek2. Ikhwan pun mendapat banyak respon positif warganet. Rerata mereka menyukai setiap postingan yang Ikhwan unggah.

“Enggak nyangka sih karya saya yang semula iseng, ternyata banyak respon positif dari warganet. Dari situ, saya jadi tertarik menggeluti miniatur ini yang saya beri nama Bang Korek. Dan bahkan



jumlah pengikut saya bertambah banyak,” ujar Ikhwan.

Ikhwan menceritakan, kemampuan seni berkarya yang digelutinya berangkat dari hobinya yang menyukai dunia potret bertema keindahan alam ataupun peristiwa nyata. Lalu ia mencoba untuk memotret objek yang berbeda. Munculah ide objek miniatur buatan korek kayu.

“Awalnya saya bikin dari kertas. Saya buat seperti figur manusia. Ternyata susah juga ya bikinnya. Terus saya coba buat dari batang korek,” ungkap Ikhwan.

Untuk membuat miniatur, Ikhwan tidak menggunakan bahan material yang mahal. Cukup batang korek api, benang,

lem, kawat dan tang. Sementara untuk membuat objek tersebut menjadi hidup dan nyata, Ikhwan pun melengkapinya dengan beragam aksesoris. Seperti tambahan membawa tas, mengenakan pakaian lengkap, tongkat, kamera dan masih banyak lagi sesuai narasi cerita.

“Enggak tahu kenapa saya lihat batang korek itu tertarik. Makanya saya coba-coba bikin seperti manusia ternyata hasilnya unik juga. Untuk pembuatan tubuh dengan batang korek. Langkah selanjutnya yaitu saya melilitkan benang ke batang korek untuk jadi pakaian dan saya kasih lem sesuai yang mau saya bikin,” tuturnya.

Ikhwan menerangkan, untuk pembuatan satu karakter tertentu, ia mampu mengerjakan hanya dengan durasi 30 menit. Namun meski hanya sebentar, Ikhwan membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang luarbiasa.

“Kalau ide cerita biasanya saya cuma lihat dari kehidupan sehari-hari saja, yang ada di sekitar saya,” ungkap Ikhwan.

Setelah membuat karakter dan cerita dari karya tersebut, Ikhwan kemudian memotretnya menggunakan kamera. Supaya narasi cerita lebih nyata, terkadang Ikhwan akan membawa hasil karyanya ke berbagai tempat. Termasuk ketika dia *traveling* maupun naik gunung.

Kerajinan tersebut dijual bagi siapapun yang berminat. Bahkan pembeli bisa memesan sesuai bentuk yang diinginkan. Satu karya miniatur korek api dijual dengan harga berkisar antara Rp 50 ribu sampai ratusan ribu, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya.

Saat ini Ikhwan sedang vakum dari transaksi jual beli karya karena rutinitas kesibukannya. Ikhwan berencana akan menjual karya-karyanya lagi.

“Saya jarang promosi hasil karya yang ingin dijual karena kesibukan kerja. Tetapi biasanya kalau ada yang memesan melalui pesan di sosmed. Dan kalau saya sedang luang, saya terima,” ungkapnya.

Selain itu, Ikhwan juga sempat berkeinginan menggelar pameran tunggal miniatur batang korek api. Namun karena rutinitas kesibukannya, sampai sekarang belum terlaksana.

“Tapi karya saya juga dijual bagi siapapun yang berminat. Saya mau bikin pameran tunggal, tapi belum kesampaian karena sibuk bekerja. Mungkin nanti,” pungkasnya. •**Muiz**

## Perayaan Imlek 2022 Tetap Khusyuk Meski Sederhana

Sudah dua tahun, umat Konghucu merayakan Imlek dalam masa pandemi. Mereka pun harus secara bergantian melakukan sembahyang. Namun demikian, tak sedikit pun mengurangi rasa syukur.

Keinginan bercengkerama dengan kerabat dan sesama, dalam perayaan Imlek terpancar dari wajah mereka. Namun terpaksa harus mereka hindari karena aturan protokol kesehatan (prokes) yang harus diterapkan.

"Tapi walau begitu, Imlek di tahun Macan Air ini terasa lebih tenang dan khusyuk. Kita rayakan dengan sederhana," ujar Xia, salah seorang jemaat.







## Mahmudi

# Terenyuh Saat Anak-Anak Minta Ajari Mengaji

Tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren, membentuk kepribadiannya yang tetap mengajari mengaji anak-anak meski di sela-sela kesibukannya menjadi wakil rakyat. Bagaimana kisahnya?

**M**ahmudi terharu saat melihat kedatangan anak-anak desa ke rumahnya yang meminta diajarkan mengaji. Betapa tidak. Para anak-anak itu datang bukan karena diperintah orangtua mereka melainkan karena kemauan mereka sendiri.

“Awalnya enggak tahu gimana ceritanya, anak-anak yang ke sini langsung minta belajar ngaji,” aku Mahmudi.

Seiring waktu, jumlah santri yang belajar mengaji di rumahnya semakin banyak. Ruangan tamu yang ia gunakan sebagai tempat mengaji pun tak lagi mampu menampung. Kondisi itulah yang mendasari Mahmudi mantap mendirikan majelis taklim untuk mewadahi anak-anak belajar mengaji.

Mulai bakda magrib hingga selepas isya, Mahmudi akan bersiap menuju majelis taklim. Menga-

jari anak-anak membaca al-qur’an, ilmu hadits, fikih hingga kitab aqidah. Para santri kalong itu pun tak perlu repot-repot membawa perlengkapan lainnya karena telah disediakan di majelis taklim.

Sebagai seseorang yang dibesarkan di pondok pesantren, Mahmudi memang telah bertekad untuk mengamalkan ilmunya. Mahmudi pernah mondok di Ponpes Al-Fatah Indramayu hingga Ponpes Lirboyo Kediri.

Ia teringat pesan tiga kiai pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Almaghrulah KH Abdul Karim, KH Marzuqi Dahlan dan KH Mahrus Aly.

Menurutnya, ketiga kiai tersebut pernah menitipkan pesan kepada santri. “Di manapun dan kapanpun, jangan sampai tinggalkan belajar dan mengajar,” kata Mahmudi, menirukan dawuh kiainya.

Selama mondok di Ponpes Lirboyo, dirinya



pernah diberi amanat menjadi Ketua Jam'iyah Syubbaniyah Pusat (JSP) selama satu priode. JSP adalah sebuah organisasi keluarga besar santri Lirboyo dari Jawa Barat.

Usai lulus mondok di Pesantren Lirboyo, ia pun diminta untuk mengabdikan di Ponpes Nurul Qadim Paiton, Probolinggo selama 3 tahun.

Sepulang dari mesantren, Mahmudi aktif di lembaga pemerintahan desa. Ia pernah menjadi penghulu hingga Kepala Urusan Pemerintahan Desa Winong, Kecamatan Gempol.

Di luar itu, Mahmudi juga aktif di ormas Nahdlatul Ulama (NU). Hingga kini, ia pun masih menjabat sebagai ketua tanfidziyah Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Gempol sekaligus Wakil Sekretaris Pe-

ngurus Cabang (PC) NU Kabupaten Cirebon.

Sementara karir politiknya, Mahmudi memulai dari pengurus tingkat desa hingga kabupaten. Pada tahun 1998, tepatnya saat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja lahir, Mahmudi diminta menjadi Ketua Ranting PKB Desa Winong.

Tak berhenti di situ, Mahmudi pun dipercaya kembali menjadi Ketua PAC PKB Kecamatan Gempol. Saat ini ia juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Cirebon.

Pengalamannya menjadi seorang kiai kampung dan aktivis organisasi keagamaan, sosial, hingga politik membuat hati masyarakat semakin terpicat dengannya. Para masyarakat pun mendorongnya untuk maju

menjadi wakil rakyat.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019, Mahmudi mendapat dukungan dari masyarakat untuk mencalonkan diri. Walhasil Mahmudi terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 untuk Dapil 2 Cirebon.

"Saya bersyukur diberi kesempatan mengamalkan hadits *khoirunnas anfa'uhum linnas* lewat kebijakan. Dengan begitu, saya bisa lebih dekat dengan masyarakat," jelas Mahmudi.

Meski telah menjadi wakil rakyat, Mahmudi tak melupakan khidmahnya sebagai alumni pesantren. Ia masih tetap mengisi waktu luang mengajar ngaji. Baginya itu merupakan sarana tetap dekat dengan masyarakat. Tak berlebihan bila ia layak menjadi teladan bagi kebanyakan orang.

### Konsisten Perjuangkan MDTA

Saat ini, Mahmudi merasa bertanggungjawab dalam membangun Kabupaten Cirebon yang agamis sebagaimana visi misi Bupati Cirebon. Seperti peningkatan kualitas pendidikan keagamaan melalui MDTA.

Mahmudi menilai, keberadaan MDTA di Kabupaten Cirebon masih sangat memprihatinkan. "Bak anak yang tak punya ayah dan ibu," ujarnya.

Untuk itulah, ia begitu konsisten sejak menjabat dengan memperjuangkan nasib MDTA melalui Perda MDTA yang telah disahkan pada Juni 2021.

"Meskipun sampai sekarang perda perubahan MDTA masih dikoreksi oleh bagian provinsi dan hukum. Tapi semangat untuk mengangkat harkat dan martabat MDTA benar-benar saya prioritaskan," pungkasnya.

•Muiz



## Rosihan Rusmana Pebisnis Alat Berat

Saat usia muda, Ihan memiliki hobi bermotor. Sebelum saat ini menjadi wakil rakyat yang juga pebisnis alat berat. Bagaimana kisahnya?

**S**emula, laki-laki satu ini acuh pada hiruk-pikuk politik. Namun takdir berkata lain. Jalan hidupnya justru membawa ia mengemban amanah besar. Menjadi penyambung lidah rakyat.

Ia adalah Rosihan Rusmana, anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Golkar. Rosihan, atau kerap dipanggil Ihan, mulanya tidak pernah terpikir jika suatu hari nanti, ia akan menjadi penyambung lidah para warga. Padahal, kala muda, ia bahkan sempat beranggapan jika dunia politik itu hanya akan membuat pusing.

Tak ayal, di masa mudanya ia hanya menghabiskan waktunya dengan bermain bersama sejawatnya maupun membantu usaha keluarga.

"Awalnya saya tidak berminat dalam dunia politik waktu usia remaja. Di pikiran saya politik itu ribet dan pusing. Soalnya dulu saya anaknya suka main, ikut teman kesana-kesini sampai pernah ikut gabung dengan salah satu klub motor di wilayah Cirebon," ungkap Ihan.

Di usia remaja kala itu, Ihan muda menemukan sisi lain dari sebuah klub motor. Bukan hanya kumpulan-kumpulan, *touring* dan berkendara, bagi Ihan, ia menemukan sifat solidaritas yang membuatnya terpincut.

"Saya pernah ikut *touring* ke Yogyakarta, saya benar-benar merasakan kebersamaan dan kesetiakawanan yang sangat tinggi antar anggota. Selain kumpulan dan *touring*, klub juga sering ada bakti sosial yang," jelas Ihan.

Meskipun hanya sebentar gabung di klub motor itu, Ihan mengaku mendapatkan kesan yang baik.

"Sejak SMA saya mulai gabung dengan klub motor itu, lalu pas kuliah saya sudah tidak aktif lagi ikut kegiatan. Meskipun suka main, saya selalu diajari untuk bertanggungjawab. Selepas SMA saya diminta memegang usaha cucian mobil milik keluarga, bersama saudara saya," ujar Ihan.





Selain aktif di klub motor, pria kelahiran Desa Ciwaringin itu menghabiskan masa remajanya dengan belajar berwirausaha bersama keluarga. Mengingat keluarga Ihan memiliki beberapa usaha. Ihan pun tak menampiknya. Ia pernah menggeluti beberapa usaha dari sewa alat berat seperti beko, bulldoser dan yang lain.

Akibat kesibukannya, Ihan bahkan sempat berada di titik dilematis untuk memilih: melanjutkan pendidikan tinggi atau fokus pada usahanya yang mulai memakan waktu.

“Setelah dipercaya untuk mengelola usaha cucian mobil, saya juga mulai belajar usaha sewa alat berat sampai saat kuliah dulu saya dapat proyek besar di PLTU sumur adem. Usaha saya mulai banyak makan waktu akhirnya saya harus melepaskan studi hukum saya di kampus

Unswagati (UGJ),” ungkapnya.

Kharismanya sebagai pengusaha muda ternyata menarik perhatian warga di desanya. Solidaritas yang ia dapat dari klub motor, dan kemampuannya mengelola sejak berwirausaha membuat jiwa kepemimpinan Ihan muncul.

Beberapa kali warga sekitar mendorong Ihan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa di desa. Namun Ihan belum mau karena merasa tidak memiliki pengalaman dalam dunia pemerintahan, Meski demikian, Ihan berkeinginan agar desanya bisa berkembang.

“Saat itu beberapa warga mendorong saya untuk mencalonkan sebagai kepala desa. Saya juga tidak tahu apa alasannya. Padahal saya cuma pengusaha dan tidak memiliki pengalaman dalam dunia pemerintahan,” herannya,

tersenyum kecil.

Hingga tepat pada 2018, Ihan diajak oleh rekan bisnisnya untuk bergabung di Partai Golkar. Ihan pun tertarik dan mulai berkecimpung dalam dunia politik. Tak butuh lama, pada Pileg 2019, ia mulai menjawab dorongan warga untuk mencalonkan diri sebagai caleg.

“Memang gabung ke dunia politik ini mulanya karena diajak rekan saja. Dan pada 2019 saya mencalonkan sebagai anggota DPRD,” jelas Ihan.

Saat ini, Ihan menjabat sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon yang membawahi segala persoalan *grass root*.

“Dengan berada di Komisi IV, saya merasa lebih dekat dengan masyarakat karena bisa membantu segala keluhan masyarakat dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan,” pungkasnya. •Par

# Komisi I: Perangkat Desa Harus Paham Aturan dan Tupoksi

Usai para kuwu baru dilantik serentak, Komisi I sidak ke desa, agar para perangkat desa baru pelajari peran dan tupoksi.



Pasca pelantikan kuwu serentak Kabupaten Cirebon pada 31 Desember 2021, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon pun berscepat mengunjungi para kuwu baru. Salah satunya kuwu Desa Jungjang Wetan, Kecamatan Arjawaninangun.

Komisi I berharap, kuwu baru akan mampu menjalankan program pemerintahan dengan baik karena sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Sehingga kunjungan ini, kami juga ingin tahu sejauh mana SDM para perangkat desa dan program yang akan di-

jalankan oleh Pemdes Jungjang Wetan,” ujar Abdul Rohman, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

Kuwu Desa Jungjang Wetan Jahuri mengatakan, ia telah menyiapkan beberapa program dari bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Di bidang pemerintahan secara internal, Jahuri akan mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai tupoksi. Sehingga diharapkan roda pemerintahan desa bisa lebih baik lagi.

Kedua, transparansi keuangan. Jahuri akan memastikan

masyarakat dapat mengetahui sumber keuangan desa dan penggunaannya. Ketiga, sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengembangan potensi desa. Terakhir, peningkatan pelayanan masyarakat.

Selain itu, Jahuri juga akan memprioritaskan pembangunan fisik. Seperti sarana transportasi publik, pembangunan sarana olahraga dan pendidikan non formal. Tak hanya itu, ia juga akan memperhatikan kesejahteraan guru melalui pemberian insentif.

“Di samping pembangu-



nan fisik, kita juga menyiapkan pembangunan mental dan akhlak melalui program insentif untuk guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan guru-guru ngaji," jelas Jahuri.

Sedangkan di bidang sosial dan kemasyarakatan, Jahuri akan mengoptimalkan kinerja RT dan RW serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Terakhir pengoptimalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

"Ya kita berharap Bumdes nanti bisa punya produk ekonomi untuk menambah

PADes. Selama ini Bumdes belum jalan," ungkapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Abdul Rahman mengapresiasi rencana program yang telah dipaparkan Pemdes Jungjang Wetan. Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama menyukseskan program Pemdes Jungjang Wetan.

"Kalau masyarakatnya konflik terus, bagaimana perangkat desa bisa membangun desanya," katanya.

Oleh karena itu, Rohman juga berharap, Pemdes Jungjang Wetan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah maupun

provinsi dengan terus menyosialisasikannya.

Apresiasi program juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Diah Irwany Indriyaty. Agar program berjalan sesuai harapan, Diah berpesan kepada seluruh perangkat desa untuk mempelajari peran dan fungsi tupoksinya.

"BPD, LPMD, KAUR Pemerintahan, KAUR Perencanaan, KAUR Keuangan hingga Lebe harus tau tugasnya apa. Masing-masing perangkat desa harus mempelajarinya. Jangan hanya tampil gagah, tetapi etos kerjanya rendah," tegas Diah.

Diah juga mengingatkan kepada pendamping desa agar bisa memetakan masalah yang sedang dihadapi warga. Menurutnya pendamping desa jangan sampai melangkahi peran dan tanggungjawab kuwu.

"Pendamping desa jangan nglangkahin kuwu maupun perangkat desa lain. Misalnya, mempercayakan pajak kepada pendamping desa saja. Itu tidak boleh," ungkapnya.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi mengatakan, batasan kewenangan kuwu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014. Begitu pun proses pemberhentian kuwu harus melalui prosedur yang tercantum dalam PP tersebut.

Dijelaskan dalam PP No 43 Tahun 2014, pemberhentian kuwu harus didasari beberapa alasan. Diantaranya meninggal dunia, mengundurkan diri hingga usia telah genap 60 tahun. Setelah memenuhi salah satu syarat tersebut, selanjutnya harus mendapatkan persetujuan dari camat.

"Maka dari itu, dalam kasusnya sering terjadi kuwu yang didesak warga untuk mundur, dia menang dalam gugatan di PTUN karena pemberhentiannya tidak melalui mekanisme yang tepat," ujar Junaedi. • **Muiz**

# Sidak Pengelolaan Wisata Banyu Panas Gempol

Kawasan Banyu Panas Gempol bersiap kembangkan beberapa wahana baru untuk anak-anak. Komisi IV apresiasi PT Indocement yang berhasil memanfaatkan dana CSR untuk wisata.



**T**erik matahari yang menyengat siang itu mengiringi kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon di PT Indocement Tunggal Prakasa (ITP) di Palimanan Barat, Kecamatan Gempol. Dalam kegiatan tersebut, Komisi IV tengah mengawasi perkembangan pariwisata di kawasan pemandian air panas dikenal dengan sebutan Banyu Panas Gempol.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Herianto menjelaskan bahwa Banyu Panas Gempol merupakan salah satu sumber air panas yang memiliki keuntungan karena berada di

PT Indocement. Sehingga akan mudah dalam pengembangan kawasan wisata.

Selain itu, Herianto pun berpendapat, jika dibandingkan dengan wisata air panas Kuningan, kadar kejernihan Banyu Panas Gempol masih unggul. Sehingga ia pun berharap, kawasan Banyu Panas Gempol ini akan menjadi destinasi yang populer lainnya di Ciater-Subang. Selanjutnya, ia juga berharap manajemen wisata ini bisa lebih baik dan bisa ditiru oleh wisata lainnya.

Asistant of General Manager Kompleks Pabrik Cirebon Otto Ahadijat, mengungkapkan jika

PT ITP Palimanan senantiasa melakukan pengembangan pariwisata di sekitar. Salah satunya wisata air pemandian Banyu Panas Gempol yang berada dekat dengan kawasan pabrik.

Menurutnya, pemandian air panas ini merupakan kawasan pariwisata pertama yang dibangun oleh PT ITP sejak 2010.

“Pada September 2017, PT ITP Palimanan juga membangun kawasan wisata batu alam dan akhir 2017 lalu kami mengembangkan wisata batik Ciwaringin,” ungkap Otto.

Sementara pada tahun 2022 ini, PT Indocement berencana



untuk membuka kawasan wisata baru di Palimanan Barat. Yakni wisata petik jamur, yang berkonsep kedai kopi dengan memunculkan produk olahan jamur sebagai camilan.

“Kami membuka wisata itu agar nantinya bisa mengembangkan para pelaku UMKM masyarakat sekitar dengan harapan ekonomi bisa bangkit dan kan membaik,” papar Otto.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina pun menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, masyarakat sekitar PT Indocement sangat beruntung, karena jarang sekali perusahaan mau untuk membantu ladang ekonomi warga sekitar.

Ia pun membandingkan keberadaan perusahaan lain di Kabupaten Cirebon, yang belum semuanya sadar akan pentingnya memanfaatkan dana CSR untuk pengemabangan ekonomi.

“Kapan yah perusahaan di Kabupaten Cirebon bisa mengalokasikan dana CSR seperti Indocement? Saya lihat belum semuanya melakukan itu,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Mahmudi, mengatakan, jika kawasan wisata Banyu Panas Gempol ini sangat potensial. Ditambah ada perluasan kolam dan penambahan permainan air, tak heran kalau wisata ini menjadi salah satu pilihan bagi warga

Cirebon.

Meski demikian, Mahmudi pun mempertanyakan sejauh mana pengelolaan Banyu Panas Gempol dan retribusi yang telah diberikan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon.

“Sebenarnya berapa retribusi yang masuk untuk Pemda? Dan berapakah harga tiket?” tanya Mahmudi.

Menjawab itu, Suhada, Ketua Koperasi Karyawan Banyu Panas Gempol menerangkan bahwa pengelolaan ini menggunakan koperasi karyawan dengan sistem bagi hasil.

“Hasil dari pendapatannya kami bagi 20 persen untuk Bapenda, 10 persen untuk desa dan 70 persen untuk koperasi dan PT Indocement,” terang Suhada.

Kemudian untuk harga tiket masuk, kata Suhada, yakni sebesar 15 ribu rupiah. Menurutnya harga tersebut sudah sesuai dengan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena dalam UMK juga menghitung besaran tunjangan berapa biaya wisata yang ideal.

“Sehingga besaran harga tiket tersebut tidak bisa dinaikkan atau diturunkan begitu saja. Karena akan berdampak pada UMK di Kabupaten Cirebon nantinya,” ungkap Suhada.

Sementara ini, Suhada menjelaskan, pengelola Banyu Panas Gempol tengah merencanakan penambahan beberapa wahana untuk menunjang anak-anak sekolah disekitar yang ingin berwisata air panas. Agar anak-anak TK, SD tidak perlu jauh-jauh ke Kuningan.

“Penambahannya berupa wahana *outbond* dan wahana-wahana air khusus anak-anak,” kata Suhada.

# Studi Banding Tata Kelola Aset Perumahan Subsidi

Pemkot Bekasi dianggap berhasil dalam percepatan penyerahan fasilitas PSU sebagai aset Pemkot setelah revisi Perda.



Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi DPRD Kota Bekasi. Mereka berkeinginan menggali informasi mengenai pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan bersubsidi di Kota Bekasi yang dianggap memiliki sistem yang baik. Kunjungan kerja Komisi III itu pun diterima langsung Kasubag Humas Protokol DPRD Kota Bekasi Dewi Tarpih.

Dewi menerangkan, pada tahun 2020 semula Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang me-

mintakan agar Pemkot Bekasi mempercepat serah terima PSU yang berupa fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum) dari pengembang.

Pasalnya sebagaimana data per 31 Agustus 2020, PSU yang telah diserahkan dan masuk neraca pemkot baru sebanyak 128 perumahan dengan luas 1,6 juta meter persegi dengan nilai Rp 2,8 triliun. Sedangkan PSU yang telah diserahkan namun masih proses penetapan nilai berjumlah 5 perumahan dengan luas 9.174 meter persegi. Sisanya belum menyerahkan PSU dengan luas 172.763 m<sup>2</sup>.

“Itu dasarnya mengapa kita ingin ada percepatan PSU perumahan bersubsidi. Karena menurut KPK penyerahan fasum-fasos dari pengembang ke Pemda untuk Kota Bekasi waktu itu baru 21 persen. Dan itu yang menjadi inspirasi Pemkot Bekasi berinovasi,” ujar Dewi.

Dewi mengungkapkan, beberapa persoalan dalam penyerahan PSU yang terlambat akibat tak adanya biaya hingga keberadaan pengembang yang sudah tidak diketahui oleh Pemkot setelah pekerjaan selesai.

Oleh karena itu, Pemkot Bekasi pun merespon cepat agar





hal tersebut tak terulang dengan merevisi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Penyerahan PSU untuk kawasan perumahan, perdagangan dan industri bersama DPRD Kota Bekasi.

Menurut Dewi, Komisi III DPRD Kota Bekasi berupaya menjalani tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebaik mungkin, agar aset yang berpotensi dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi bisa terselamatkan. Salah satunya, mempercepat penyerahan dari fasos-fasum pengembang yang telah selesai mengerjakan pembangunan fisik. Baik perumahan

vertikal, kawasan perdagangan hingga industri.

Semula dalam Perda lama Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 20 disebutkan, penyerahan PSU secara fisik pengembang, perumahan vertikal, kawasan perdagangan, dan industri diserahkan setelah PSU dibangun 100 persen dan telah dipelihara selama 6 bulan terhitung dari saat selesainya pembangunan.

“Nah sekarang setelah direvisi, mekanisme penggantian relokasi PSU, atau pembayaran ke kas daerah sejumlah uang untuk pengadaan penggantian. Selain itu, dalam waktu 6 bulan pengembang wajib menyerah-

kan fasum-fasos ke pemkot. Kalau tidak maka ada sanksi yang siap dikenakan,” jelas Dewi.

Hal tersebut, kata Dewi, bertujuan untuk merespon kebijakan KPK beberapa waktu yang lalu, terkait percepatan penyerahan fasos-fasum dari pengembang. Sesuai Perda Nomor 16 tahun 2011, Perda 12 tahun 2016, serta Perda perubahan di tahun 2020.

“Ada tambahan klausul dalam Pasal 19 dan Bab XII tentang Ketentuan Peralihan serta Pasal 34 yang berisi pembangunan yang lebih dari 5 tahun dapat langsung diserahkan kepada Pemda setelah dilakukan verifikasi sebagaimana yang dimaksud pasal 23. Disamping itu, jika tidak dilakukan, pada bab selanjutnya ada sanksi administrasi dan ketentuan pidana,” tutur Dewi.

Merespon itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka pun sangat mengapresiasi langkah kecepatan Pemkot Bekasi dalam menjaga aset. Ia menilai masalah mengenai pengelolaan PSU perumahan bersubsidi memiliki kesamaan dengan kondisi Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini.

“Permasalahan atau kendala dalam pengelolaan PSU perumahan subsidi hampir sama dengan kami, yaitu mengenai biaya dan juga pengembang yang tidak jelas keberadaannya,” jelas Teguh.

Selepas mendengar penyampaian DPRD Kota Bekasi, Teguh pun berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon akan dapat meniru untuk berinovasi dalam penyerahan PSU.

“Kita juga akan mendorong agar para pengembang nantinya dapat mematuhi aturan-aturan dalam pengelolaan PSU atau fasos, fasum perumahan hingga biaya pemeliharaan,” tandas Teguh. •par

# Tiga Raperda Usulan Eksekutif dan Legislatif Dihantarkan

Ada tiga raperda yang dihantarkan untuk disahkan dalam paripurna DPRD. Dua usulan berasal dari bupati dan sisanya DPRD yang prakarsai perubahan perda. Apa saja?



**D**ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon bersama Bupati Cirebon Imron menggelar paripurna untuk membahas 3 usulan rancangan peraturan daerah (raperda). Diantaranya, raperda tentang pengelolaan keuangan daerah dan raperda tentang retribusi penggunaan tenaga asing yang diusulkan Bupati Cirebon.

Sementara sisanya yakni, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang diprakarsai DPRD Kabupaten Cirebon.

Imron mengatakan, raperda

yang dibacakan ini, merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

“Sehingga dua raperda itu kita sesuaikan dengan Permen- dagri Nomor 77 Tahun 2020 Pasal 3 yang nantinya akan dijadikan dasar pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunannya,” ujar Imron.

Imron memaparkan, raperda pertama tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah berisi muatan pengelolaan keuan-

gan daerah, struktur APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, kekayaan dan utang daerah hingga informasi keuangan daerah.

Sementara raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing didasari dari surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 011/5976/sj, yang berisi percepatan penyusunan regulasi persyaratan dasar perizinan berusaha, penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung, retribusi gedung serta retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

“Jadi raperda retribusi peng-



gunaan tenaga kerja asing karena berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengatur tenaga kerja asing," jelas Imron.

Sejauh ini Kabupaten Cirebon baru memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mepekerjakan Tenaga Kerja Asing. Namun hal itu belum memuat mengenai retribusi. Sehingga, kata Imron perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat.

"Sehingga perlu Perda tersendiri yang khusus membahas retribusi tenaga asing," tambahnya.

Imron mengungkapkan, konsekuensi dari belum adanya Perda retribusi penggunaan tenaga kerja asing, telah berdampak pada pengalihan retribusi yang semula untuk daerah dikembalikan ke pusat.

Per 1 Juli hingga Oktober 2021, kata Imron, retribusi yang seharusnya masuk menjadi PAD Kabupaten Cirebon sebesar Rp 342,8 juta telah dikembalikan ke kas negara. Jumlah tersebut berasal dari 20 orang tenaga kerja asing. Sedangkan di tahun 2021, senilai Rp 171 juta yang berasal dari 11 orang tenaga kerja asing pun dikembalikan ke negara.

Sementara itu raperda yang

diajukan DPRD Kabupaten Cirebon tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 karena dianggap Perda yang ada tidak lagi relevan dengan kondisi aktual. Sebagaimana laporan WCC Mawar Balqis misalnya, dua bentuk kekerasan, yakni kekerasan seksual dan KDRT di Kabupaten Cirebon kian meningkat pada 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jadi memang sudah sepatutnya direvisi Perda PPPA itu," ujar Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Ismiyatul Fathiyah Yusuf, saat bertemu Cirebon Katon.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan mengatakan, peranan dan kiprah perempuan dalam kehidupan masyarakat maupun pembangunan nasional terus meningkat. Oleh karena itu, menurutnya, raperda tersebut patut segera disahkan oleh Bupati Cirebon.

Rancangan Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menjadi inisiatif DPRD. Meskipun Kabupaten Cirebon sudah memiliki regulasi itu, tapi sudah berubah. Harus disesuaikan.

"Hari ini peran perempuan masih banyak yang termarginalkan dan dipandang sebelah mata. Maka usulan perubahan raperda ini harus segera disahkan," kata Aan.

Selain itu, di akhir pidatonya, Aan mengingatkan, jika anak adalah anugerah tuhan yang dititipkan. Maka dari itu pemerintah juga seharusnya menjaga keberlangsungan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

"Kita harus sadar jika harapan kita semua digantungan kepada anak. Sehingga anak kelak akan berguna bagi orangtua, masyarakat, bangsa dan negara," pungkasnya. •Kus

# Embung Sarwadadi akan Dikembangkan Jadi Wisata Desa

Desa Sarwadadi memiliki embung yang rencananya akan disulap jadi objek wisata alam yang dapat tingkatkan PAdes. Namun masih butuh suplai air yang cukup agar terealisasi. Seperti apa?



Sebagai desa yang memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah, Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, tak luput dari pesona keindahan alam tersendiri yang memanjakan mata. Hamparan sawah yang luas, ditambah bukit menjulang, menambah kesejukan saat dinikmati waktu pagi dan sore hari.

Di balik keindahan persawahan dan perbukitan, Desa Sarwadadi ternyata menyimpan wahana alam berupa embung yang juga tak kalah menarik.

Embung tersebut, mulanya hanyalah tanah titisara yang dijadikan penampungan air untuk mengaliri lahan persawahan milik warga.

"Awalnya embung itu cuma tanah titisara milik desa. Baru pada 2007, pemdes mengubahnya menjadi embung untuk mengairi lahan persawahan. Embung itu memang selalu ramai oleh warga setiap

sore," ujar Kuwu Desa Sarwadadi Ahmad Jahid.

Jaja, sapaan akrabnya, merupakan kuwu terpilih yang baru saja dilantik pada 31 Desember 2021 lalu. Jaja pun bertekad mengubah Desa Sarwadadi agar lebih maju dan berkembang. Salah satunya melalui pengembangan embung. Pasalnya selain untuk mengairi sawah di desa, embung itu sering kali diburu para pemancing dan menjadi tempat berkumpulnya anak-anak bermain.

"Ada dua poin yang ingin saya garap di embung itu. Pertama mengoptimalkan pengairan sawah warga. Selanjutnya akan disulap sebagai tempat wisata memancing atau perahu air. Sekarang kalau sore hari, embung itu selalu ramai," ungkap Jaja.

Sebagai warga sekaligus pemimpin di desa, Jaja tahu betul akar masalah untuk membenahi embung. Diantaranya, embung kerap mengalami penyusutan



setiap musim kemarau akibat tak memiliki suplai air yang cukup.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, Embung Sarwadadi memiliki luas 33 hektare dengan daya tampung 33.273 meter kubik (m<sup>3</sup>), dan mampu mengairi 213 hektare persawahan. Selain mengairi sawah di Desa Sarwadadi, embung tersebut juga dapat mengairi lahan pesawahan desa terdekat.

Namun pada faktanya, menurut Jaja, embung tersebut belum cukup untuk mengairi sawah yang ada di Desa Sarwadadi yang hanya memiliki luas

persawahan 102 hektare.

“Petani hanya mengandalkan embung saat musim hujan untuk mengairi sawah mereka. Dengan kapasitas embung yang katanya bisa mengairi 213 hektare harusnya tidak masalah, tapi ternyata belum bisa sepenuhnya membantu perairan sawah di sini,” tutur Jaja.

Pemdes Sarwadadi pun berharap, peran pemerintah baik kabupaten dan pusat, dapat membantu memberi solusi suplai air untuk embung. Pasalnya keberadaan embung sangat dibutuhkan untuk para petani Desa Sarwadadi.

“Kami sudah ada embung tapi belum memiliki suplai air cukup. Jika memasuki bulan Juli sampai Agustus embung akan menyusut hingga kering karena tidak ada suplai air. Saya berharap semoga pemerintah bisa memperhatikan embung kami, bantu untuk perbaikan irigasi dan suplai air dari Mandirancan ke sini misalnya,” harap Jaja.

Embung sarwadadi merupakan potensi yang seharusnya dimanfaatkan dengan optimal. Dengan adanya suplai air cukup, dua poin yang menjadi fokus Pemdes Sarwadadi nantinya akan terealisasi dengan mudah. Para petani akan sejahtera hingga menghasilkan panen yang baik, dan embung pun bisa dikembangkan menjadi objek wisata.

“Menurut saya, kekurangan dari embung itu hanya karena belum memiliki suplai air ketika musim kemarau datang. Bendungannya itu ada di Mandirancan, pihak kami hanya sebatas mengajukan ke pemerintah kabupaten, tapi untuk seterusnya itu kan kewenangan lintas kabupaten,” jelas Jaja.

Jaja sadar akan batas kewenangannya. Oleh karenanya ia berharap Pemkab Cirebon dapat segera membantu mencapai programnya dengan menyambungkan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Jawa Barat sebagai pemilik kewenangan.

Meski demikian, Jaja akan terus mencoba mengupayakan agar embung sarwadadi berfungsi dengan optimal.

“Selain menjadi jantung bagi para petani di desa ini, embung itu juga akan menjadi tempat wisata yang akan membantu meningkatkan ekonomi warga dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) nantinya,” pungkasnya. •Par

# Dompyong Wetan 2022, Fokus Pembenahan Jalan

Sudah dua tahun lamanya jalan utama Desa Dompyong Wetan mengalami kerusakan parah. Pada 2022 ini, Pemdes pun akan fokus pada pembenahan jalan.



Warna (Kuwu Dompyong Wetan)

Pemerintah Desa (Pemdes) Dompyong Wetan, Kecamatan Gebang akan fokus pada perbaikan jalan pada 2022 ini.

Seperti diketahui, kondisi jalan utama Desa Dompyong Wetan telah mengalami kerusakan sejak 2020 lalu. Jalan yang menjadi tumpuan lalu lintas dan menjadi penghubung desa lain ini, telah dipenuhi lubang-lubang yang tergenang air. Akibatnya para pengendara yang melintas tampak berhati-hati saat melewati jalan.

Pemdes Dompyong Wetan sendiri, telah lama menyadari kondisi tersebut. Namun mereka

pun tak berbuat banyak lantaran dua tahun belakang mengalami *refocusing*.

“Ya saat ini kami belum bisa berbuat apa-apa, paling cuma nambal dengan pasir saja. Karena anggaran kita kemarin dialokasikan penanganan pandemi,” kata Kuwu Desa Dompyong Wetan, Warna.

Warna mengaku telah menyampaikan permohonan perbaikan ke Bupati Cirebon untuk mendorong Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Namun lagi-lagi, Pemkab Cirebon sendiri belum juga mengabulkan karena tak ada slot anggaran.

“Saya sudah berusaha bah-

kan seminggu kadang tiga kali ke pendopo bupati, karena desa kami sangat membutuhkan perhatian. Cuma saat ke sana bupati juga ngomong kalau anggaran sebagian besar sedang fokus untuk penanganan pandemi. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkap Warna.

Oleh karena itu, ia pun berupaya pada 2022 ini, akan menuntaskan pekerjaan rumah yang telah menanti meski berbenturan dengan program pemerintah pusat untuk mengutamakan pemulihan ekonomi yang dimulai dari tatanan desa. Namun Pemdes Dompyong Wetan akan memproses perbaikan jalan terlebih dahulu.

“Saat ini prioritas kami lebih menyoroti ke jalan terlebih dahulu. Saya tidak mau karena jalan rusak itu justru merugikan masyarakat nantinya. Terutama kejadian kecelakaan karena kerusakan jalan,” jelasnya.

Warna berharap, pembangunan infrastruktur jalan dapat terealisasi sesuai rencana setelah anggaran dana desa (ADD) turun.

“Udah enggak bisa nunggu lama lagi. Ini sudah kronis. Kalau itu sudah selesai baru saya akan fokus peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengembangan Bumdes,” tutur Warna.

# Pamijahan

## Bangun Kios hingga Sport Centre

Impian Pemdes Pamijahan menjadi desa unggul, mereka pun tengah fokuskan pada beberapa program. Dari pengembangan kios hingga dirikan sport centre.

Pemerintah Desa (Pemdes) Pamijahan tengah menargetkan beberapa program unggulan sebagai upaya menjadi desa maju. Di antara sederet program itu, yakni pengembangan sektor kios, pembangunan gudang rotan, pengelolaan sampah hingga pendirian sport centre.

“Saat ini kita sudah ada 12 unit kios yang siap disewakan. Kita ingin membangun 5 kios lagi dan gudang rotan untuk tingkatkan PADes,” ujar Supono, Kuwu Desa Pamijahan.

Selanjutnya, Pemdes Pamijahan juga akan fokus pada pengelolaan sampah melalui pemberian sanksi tegas kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap pengelolaan sampah.

“Kita punya tanah dekat perumahan di ujung yang berbatasan dengan Cempaka. Di sana ada TPS yang sudah dikelola oleh RT dan pemuda setempat,” jelasnya.

Selain beberapa program tersebut, target lain yang ingin dicapai yakni pembangunan sport centre sebagai sarana sarana mewadahi para pemuda yang gemar berolahraga. Apalagi, Desa Pamijahan telah memiliki lapangan bola dan Gedung Olahraga (GOR). Supono mengaku, pembangunan sport centre ini telah direncanakan sejak 2017 lalu oleh pemdes.



Supono (Kuwu Desa Pamijahan)

“Kita masih punya tanah yang bisa jadi sarana olahraga bagi masyarakat Pamijahan. Entah itu bentuknya kolam renang atau apa, yang penting ada sport centre,” ujar Supono.

Supono pun menerangkan, pada 2020 Pemdes Pamijahan sebenarnya telah mengalokasikan Rp 1 miliar untuk merenovasi lapangan sepak bola. Hanya saja, tahun 2020 harus direalokasi untuk percepatan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Karena 2020 masih ada Covid-19, jadi sisanya buat infrastruktur dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dulu,” ungkapnya.

Sementara untuk pendirian sport centre, Supono mengatakan ia telah melakukan studi banding ke Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

Pasalnya Desa Cisayong dianggap telah berhasil mengelola lapangan sepak bola yang viral dan sudah berstandar nasional dan mampu memberikan pendapatan bagi desa.

“Kita sempat studi banding ke sana karena penasaran. Ternyata bagus. Rumputnya sudah standar nasional, ada penginapan juga yang menambah penghasilan. Itu yang menjadi inspirasi kita,” katanya. •Kus

# Babakangebang Raih Prestasi Desa Peduli Migran dan WNI

Dua penghargaan diraih Desa Babakangebang karena keaktifannya dalam lindungi migran dan WNI sejak dari desa.



Yeni Setiati (Kuwu Desa Babakangebang)

**P**restasi. Kata yang layak disematkan untuk Desa Babakangebang, Kecamatan Babakan. Bagaimana tidak, pasalnya desa satu ini, selalu mendapatkan torehan prestasi. Belum lama ini, Pemerintah Desa (Pemdes) Babakangebang bahkan berhasil raih dua penghargaan sekaligus.

Penghargaan pertama, diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) pada tahun 2021, sebagai Desa Migran Produktif (Desmigratif) karena keaktifannya dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia sejak dari desa.

Penghargaan kedua diperoleh dari Kementerian Luar Negeri (Kemenu) sebagai desa yang berprestasi dalam ajang Hassan Wirajuda Perlindungan Award.

Setelah dua penghargaan diperoleh, Pemdes Babakangebang pun bersiap merambah dalam menjadi desa yang juga ramah perempuan dan anak.

Kuwu Desa Babakangebang Yeni Setiati mengatakan, akan segera memastikan Desa Babakangebang bisa ramah perempuan dan anak melalui aturan yang akan dilegalkan.

"Tahun ini kita akan segera ketuk palu mengesahkan Perdes tentang Desa Ramah Perempuan

Perlindungan Anak (DRPPA). Sudah kita godok," ujar Yeni.

Lebih lanjut, Yeni mengaku, telah menyiapkan langkah nyata untuk merealisasikan program ini melalui sosialisasi terlebih dahulu.

"Kita sudah anggarkan untuk sosialisasi. Tapi ternyata Covid 19 kembali naik. Jadi memang agak susah. Walaupun demikian kita tetap akan melaksanakan program ini dengan dana seadanya," ungkapnya.

Yeni bertekad memastikan Perdes tentang DRPPA dapat segera disahkan. Pasalnya ini merupakan salah satu program unggulannya.

Terlebih, saat ini Desa Babakangebang juga telah memiliki satuan tugas (satgas) yang dibentuk Pemdes. Satgas tersebut bertugas menyosialisasikan kebijakan dan informasi kepada masyarakat.

"Satgas yang umum itu tugasnya terjun langsung ke masyarakat mengenai bahaya geng motor misalnya, narkoba dan hal-hal yang kurang baik. Dan kita juga ingin sosialisasikan soal Perdes DRPPA itu nantinya," jelasnya.

Selain satgas umum, kata Yeni, ada pula satgas khusus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah siap turun mengawal para pekerja migran. •Kus



# Kalipasung

## Siapkan Tungku Bakar Sampah Ramah Lingkungan

Pemdes Kalipasung berupaya perangai sampah dengan membuat tungku pembakaran sampah yang ramah lingkungan. Seperti apa?

Pemerintah Desa Kalipasung, Kecamatan Gebang, dalam setahun selalu rutin menguras saluran air di sepanjang jalan desa. Bukan tanpa sebab, pasalnya saluran tersebut sering kali pampat akibat tersumbat sampah. Tak hanya di saluran, tumpukan sampah juga terlihat di beberapa titik jalan.

Akibatnya, tak hanya mengganggu para pengguna jalan karena menimbulkan bau tak sedap. Namun juga seringkali menimbulkan banjir saat musim penghujan datang.

Oleh karena itu, Endi Supriyadi, Kuwu Desa Kalipasung tak ingin tinggal diam. Ia tengah berupaya meminimalisasinya melalui pengangkutan sampah hingga menyiapkan tungku pembakaran sampah.

“Sebenarnya tungku untuk pembakaran sampah itu sudah saya siapkan sejak tahun 2021, namun terkendala dengan kelengkapan fasilitas dan petugas pengelola program yang belum ada. Jadi belum berjalan, baru akan tahun ini,” jelas Endi.

Endi pun memastikan akan mulai menjalankannya pada tahun ini dengan fasilitas seadanya. Pasalnya ia tak ingin sampah jadi persoalan yang terus-menerus berlarut.



Endi Supriyadi (Kuwu Desa Kalipasung)

“Saya sudah pernah mengajukan bantuan pengangkut sampah, namun sampai saat ini belum ada respon. Kalau terus menanti respon tersebut saya takut masalah sampah di Kalipasung semakin parah, jadi saya pastikan program penanganan sampah ini akan dimulai,” tegas Endi.

Ia pun mengaku telah melakukan studi banding hingga ke Kota Semarang dan Kabupaten Kuningan sebelum membuat tungku pembakaran sampah.

“Tungku ada di sebelah timur lapangan bola. Sebelum pembuatan tungku kami studi banding. Saya ingin tungku pembakaran itu bisa ramah

lingkungan, tidak mengganggu kegiatan warga sekitar, dan yang lebih penting hemat biaya tentunya,” tuturnya.

Alhasil, berkat studi banding itu, tungku rancangannya akan sangat ramah lingkungan, pasalnya tungku pembakaran itu mampu menampung lebih banyak segala jenis sampah dan tidak boros asap.

“Apalagi abu sampah itu juga bisa dijadikan kompos untuk para petani nantinya. Karena warga Desa Kalipasung, selain nelayan banyak juga yang berprofesi sebagai petani. Tentu akan bermanfaat untuk warga desa kedepannya,” pungkas Endi. •Par



## Laron, Apa Lebah?

Seruputan pertama kopi pagi membasahi tenggorokan. Obrolan pun mengalir. Ringan. Meski kadang-kadang berat juga. Tiba-tiba seorang sahabat bertanya: "Kang *nggak* nulis soal laron lagi?"

Aha...rupanya sang kawan masih ingat tulisan saya beberapa bulan lalu mengenai laron. "Nggak," jawabku singkat. Ekspresi wajahnya menyiratkan ketidakpuasan atas jawabanku. "Sekarang lagi suka lebah," jelasku, sedikit mengurangi kepenasarannya.

Ia pun langsung mengejar jawabanku, dengan berseloroh: "Ini pasti karena..." Belum selesai ia melengkapi kalimat itu, langsung saya potong: "Karena banyak orang mengaku berfilosofi lebah namun kelakuannya seperti laron," sergahku.

Ingat, ketika di petang hari laron keluar dari sarangnya, kemudian menuju sumber cahaya, itulah saatnya laron unjuk kekuatan. Demi meraih cinta sang ratu dia rela membiarkan ribuan saudara sekandungnya mati bergelimpangan.

Demi membuat sebuah kerajaan (koloni) baru, ia mencabik-cabik persaudaraan sekandung. Ia khianati persatuan dan kesatuan bangsa koloninya, hanya demi sang betina dan takhta barunya.

Bandingkan dengan lebah. Setelah satu tahun, sesuai daur hidupnya, lebah ratu akan melahirkan beberapa generasi baru ratu. Ratu yang paling cakaplah yang akan melangsungkan memimpin koloni lamanya, sedangkan ratu-ratu lainnya akan membuat koloni baru dengan membawa beberapa lebah pekerja.

Sama dengan laron, dalam koloni lebah juga ada kompetisi. Bedanya, di koloni laron terjadi kompetisi saling membunuh. Sedangkan di koloni lebah terjadi kompetisi yang sehat, hidup bersama, membahu dan berlomba dalam kebaikan, memberikan manfaat bagi tumbuhan dan manusia.

Di hutan, dalam satu pohon yang rimbun dan hijau, masing-masing koloni hidup damai dalam

beberapa cabang. Menggelantung membentuk harmoni. Mereka teratur dalam satu cabang, maupun dalam satu pohon. Jika ada yang mengusik salah satu cabang, lebah satu pohon itu bisa menyerang sang pengganggu.

Ada pelajaran yang menarik dari laron dan lebah ini. Dalam ber-organisasi, ber-lembaga, atau ber-negara, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang merajut harmoni, memaksimalkan potensi, dan melahirkan generasi-generasi unggul.

Lihatlah lebah, ia mencari sesuatu yang kecil, berupa nektar dan tepung sari, namun tanpa merusak bunga. Bahkan menguntungkan bagi pohon, karena membantu proses pembuahan.

Setelah itu lebah memproduksi dan menyimpan madu, makanan unggul (*superfood*) yang bersih, sehat dan lezat bagi manusia. Artinya dari potensi yang begitu kecil ia ubah menjadi sesuatu yang luar biasa besar manfaatnya. Itulah pemimpin sejati.

Sebaliknya, jika pemimpin itu rela mencabik-cabik persatuan dan membunuh saudaranya sendiri demi kekuasaan (seperti laron), maka (biasanya) koloninya pun tidak akan lama bertahan. Dalam konteks inilah, lebah lebih baik daripada laron.

"Terus Kang Luthfi *pengen* jadi lebah *gitu*?" Ujar sang kawan, tiba-tiba nyletuk. "Kalau saya, ya jadi manusia saja, yang meniru sifat baik laron dan lebah," jawabku singkat.

"Lantas bagaimana Kang, kalau ada yang berbau lebah namun aslinya laron?" Sang kawan menimpali. "Mana ada lebah begitu, itu sih namanya lebah kardus, alias wedhus gondrong, yang hanya ada dalam komik."

"Eit... Jangan salah, ada kok manusia yang sukanya merusak sistem, menghancurkan persatuan, dan membunuh potensi, hanya demi kekuasaan dirinya semata," jelasnya gak mau kalah. "Hemm..., iya juga sih, tapi itu kan manusia, bukan lebah." Seruput dulu *bro*....



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



# Ayo Wujudkan **CIREBON BEBAS SAMPAH**

- ✓ Perda Khusus Pengelolaan Sampah
- ✓ Pembangunan TPA & TPS Desa
- ✓ Budaya Hidup Bersih



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



# Ayo Dukung CIREBON BEBAS BANJIR

- ✓ Perda Khusus Penanganan Banjir
- ✓ Normalisasi Daerah Aliran Sungai
- ✓ Gerakan Masyarakat Sumur Resapan